

**Pengaruh Fiskal Moneter Terhadap Perekonomian Indonesia
(Studi Komparasi Antarezim Anggaran 1990-2019)**

Rio Kartika Supriyatna
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Bogor
riokartikasupriyatna@mes-bogoraya.net

Dedi Junaedi
IAI-N Laa Roiba Bogor
dedijunaedi@gmail.com

Evinovita
IAI-N Laa Roiba Bogor
evinovita@laaroiba.ac.id

ABSTRACT

This study aims: to analyze whether fiscal monetary policy and differences in budget regimes affect the Indonesian economy (GDP). This research uses quantitative analysis methods; data used time series 1990-2010, the analysis technique used multiple regression with dummy variables. The results show that monetary stability has a significant effect on GDP development with correlation efficiency (R^2) of 0.9969. The state budget, investment, BI-Rate, imports and the exchange rate have an effect and differences in the budget regime have a significant effect on GDP development. Meanwhile the variables of financing, exports and inflation have no significant effect on GDP. APBN, investment, BI-Rate and different budget regimes are positively correlated with GDP. Meanwhile, imports and the exchange rate have a negative correlation to GDP. In relative terms, the use of an integrated and performance-based budgeting system is better than a balanced budget system. Likewise, the performance-based budgeting system is also relatively better off than the integrated budget system. This means that the reform of the budget system in Indonesia has been on the right track.

Keywords: *Indonesia's GDP, budget system, monetary stability*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: menganalisis apakah kebijakan fiskal moneter dan perbedaan rezim anggaran berpengaruh terhadap perekonomian (PDB) Indonesia. Penelitian menggunakan metode analisis kuantitatif; data yang digunakan time series 1990-2010, teknik analisis yang dipakai regresi berganda dengan dummy variabel. Hasilnya menunjukkan bahwa stabilitas moneter berpengaruh nyata terhadap perkembangan PDB dengan keefisien korelasi (R^2) 0,9969. APBN, investasi, BI-Rate, Impor dan kurs berpengaruh dan perbedaan rezim sistem anggaran berpengaruh nyata terhadap perkembangan PDB. Sementara variabel pembiayaan, ekspor dan inflasi berpengaruh tidak nyata terhadap PDB. APBN, investasi, BI-Rate dan perbedaan rezim anggaran berkorelasi positif terhadap PDB. Sementara impor dan kurs berkorelasi negatif terhadap PDB. Secara relatif, penggunaan sistem anggaran terpadu dan berbasis kinerja lebih baik dari sistem anggaran berimbang. Demikian juga sistem anggaran berbasis kinerja juga lebih baik secara relatif dibanding sistem anggaran terpadu. Artinya, pembaruan sistem anggaran di Indonesia selama ini sudah berada pada jalur yang benar.

Kata Kunci: **PDB Indonesia, sistem anggaran, stabilitas moneter**

PENDAHULUAN

Stabilitas dan pertumbuhan merupakan dua kata kunci dalam pembangunan ekonomi nasional. Ini berlaku pada hampir semua negara dan bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Bahkan, keduanya -- stabilitas dan pertumbuhan -- merupakan bagian penting dalam sejarah pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).

Sedikitnya 28 negara Eropa telah menyepakati *Stability and Growth Pact (SGP)* sebagai platform kebijakan dasar pembentukan Uni Eropa (Eur-Lex.europa, 1997). Pakta ini tertuang dalam Pasal 121 dan 126 *Treaties of the European Union*. Pakta ini mengatur pengawasan kondisi fiskal negara-negara anggota MEE oleh Komisi Eropa dan Dewan Menteri; mengeluarkan rekomendasi kebijakan tahunan untuk memastikan agar negara-negara anggota MEE tetap memenuhi kriteria SGP. Apabila negara anggota melanggar batas defisit dan utang maksimal yang ditetapkan, pengawasan dan permintaan untuk melakukan tindakan korektif akan lebih diperketat melalui deklarasi Prosedur Defisit Berlebihan (EDP); dan bila tindakan korektif tak kunjung dilakukan setelah memperoleh peringatan berkali-kali, negara-negara anggota dapat mengeluarkan sanksi ekonomi ((Eur-Lex.europa, 2012).

Diusulkan pertama kali oleh Menteri Keuangan Jerman, Theo Waigel, pada pertengahan tahun 1990-an, SGP ditetapkan oleh sebuah resolusi dan dua regulasi Dewan Eropa pada Juli 1997. Regulasi pertama "mengenai penguatan pengawasan posisi keuangan dan pengawasan dan koordinasi kebijakan ekonomi" (juga disebut regulasi "preventif") mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1998. Regulasi kedua "mengenai pemercepatan dan klarifikasi pemberlakuan prosedur defisit berlebihan" (atau disebut regulasi "disuasif") mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1999 (*The Guardian*, 2003)

Tujuan pakta SGP, menurut Paul de Grauwe (2005), adalah untuk menjaga kedisiplinan keuangan di MEE. Semua negara anggota Uni Eropa secara otomatis menjadi anggota MEE dan Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan, seperti yang ditetapkan oleh Perjanjian Uni Eropa.

Thema stabilitas dan pertumbuhan juga menjadi bagian penting sejarah pembangunan nasional di Indonesia. Stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan adalah konsep dasar pembangunan yang diterapkan di Indonesia pada era Pemerintahan Orde Baru. Presiden Soeharto, kata Emil Salim (2010), dikenal sebagai pencetus konsep Trilogi Pembangunan. Belakangan, konsep dan jargon berbau Orba ini menimbulkan kontroversi. Ada pihak yang khawatir dengan kebangkitan Orba. Pada saat yang sama, ada juga kalangan yang kangen dengan 'stabilitas' dan 'ketegasan' rezim Orba.

Terlepas dari pro-kontra itu, faktanya, stabilitas dan pertumbuhan juga menjadi fokus penting perhatian semua rezim pemerintahan. Mulai dari era Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputeri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo.

Bahkan, isu stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi selalu menjadi tema sentral rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Melalui siaran pers tanggal 23 April 2019, misalnya, KSSK menyimpulkan stabilitas sistem keuangan (SSK) Triwulan I 2019 terjaga dengan baik. Kesimpulan ini berdasarkan hasil pemantauan KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan. Pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung aman dan damai turut meningkatkan kepercayaan publik terhadap Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK, 2019).

sejak Indonesia merdeka setidaknya sudah berlaku empat sistem anggaran. Yaitu sistem anggaran berbasis program, anggaran berimbang, anggaran terpadu, dan anggaran berbasis kinerja (Frida Fanani Rohma, 2017). Sistem anggaran berbasis program pertama kali dipakai di

Amerika Serikat tahun 1960-AN. Sebagian ahli menyebutnya sebagai sistem anggaran lama karena diterapkan pada masa Orde Lama sampai periode awal Orde Baru (1974). Sistem anggaran berimbang berlaku pada periode 1975-1998. Sistem Anggaran Terpadu digunakan era awal reformasi, dari 1999-2003. Sementara sistem anggaran berbasis kinerja berlaku pada periode 2004 hingga 2019.

Seberapa penting relasi antara kebijakan fiscal moneter dengan perekonomian Indonesia. Apakah ada korelasi yang saling mempengaruhi antara keduanya? Apa saja aspek stabilitas moneter yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Apakah perbedaan rezim pemerintahan berpengaruh terhadap korelasi keduanya? Untuk menjawabnya, tim peneliti bermaksud melakukan penelitian berjudul: *Pengaruh Fiskal Moneter terhadap Perekonomian Indonesia: Studi Komparasi Antarezim Anggaran 1990-2019*.

Penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis apakah kebijakan fiscal moneter berpengaruh terhadap perekonomian (PDB) Indonesia.
2. Menganalisis apakah perbedaan rezim anggaran berpengaruh terhadap tata kelola fiscal moneter dalam mendukung pencapaian PDB Indonesia?

TINJAUAN LITERATUR DAN STUDI TERDAHULU

Pendapatan Nasional

Produk Domestik Bruto atau GDP (*Gross Domestic Product*), menurut Mankiw (2006:5) adalah statistik perekonomian penting karena dianggap sebagai indikator terbaik mengenai kesejahteraan masyarakat. McEachern (2000:146) berpendapat, PDB adalah jumlah nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDB juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu. PDB ditentukan berdasarkan dua pendekatan: pendekatan pengeluaran, (menjumlahkan seluruh pengeluaran agregat pada seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi selama satu tahun); Pendekatan pendapatan (menjumlahkan seluruh pendapatan agregat yang diterima selama satu tahun oleh mereka yang memproduksi output tersebut).

PDB dapat dihitung dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan (Callen, 2016). Rumus umum PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:

$$PDB = \text{konsumsi} + \text{investasi} + \text{pengeluaran pemerintah} + (\text{ekspor} - \text{impor})$$

Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor.

Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi:

$$PDB = \text{sewa} + \text{upah} + \text{bunga} + \text{laba}$$

Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.

Secara teori, menurut Lequiller (2006), PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun, karena dalam praktik menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.

Stabilitas Moneter dan Fiskal

Sistem keuangan sangat penting untuk mendukung kemajuan pada sektor riil di semua negara, termasuk Indonesia. Sektor keuangan akan selalu mengikuti perkembangan sektor riil (Robinson dalam Sukrudin, 2014). Untuk itu diterapkan standar pengelolaan moneter dan fiscal.

Garry J. Schinasi (2006) mendefinisikan stabilitas keuangan (moneter) sebagai kondisi tidak adanya ketidakstabilan, situasi di mana kinerja ekonomi terbebas dari fluktuasi harga aset keuangan atau oleh ketidakmampuan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban kontraknya.

Ketidakstabilan keuangan, jelas Mishkin (1999:7), terjadi ketika guncangan pada sistem keuangan mengganggu aliran informasi sehingga sistem keuangan tidak lagi dapat melakukan tugasnya menyalurkan dana kepada mereka yang memiliki peluang investasi yang produktif.

Uni Eropa menerapkan standar *Stability and Growth Pact* (SGP). Intinya, semua negara anggota diminta menerapkan kebijakan fiscal dan moneter yang ketat agar defisit pemerintah tidak melebihi 3% produk domestik bruto (PDB) dan utang tidak melebihi 60% PDB. Apabila jumlah utang melebihi 60%, setiap tahun utang tersebut harus dikurangi. Sebagai upaya preventif, semua negara anggota Uni Eropa harus mengirim laporan tahunan untuk dinilai dan diperiksa oleh Komisi Eropa dan Dewan Menteri. Laporan tersebut harus menyajikan perkembangan keuangan negara saat ini dan tiga tahun berikutnya (EC, 2012).

Kebijakan Indonesia

Trilogi Pembangunan, menurut Emil Salim (2010), muncul sebagai respon Presiden Soeharto terhadap kondisi hiper inflasi akibat tidak terkendalinya uang yang beredar dan defisit APBN. Pada masa peralihan Orla ke Orba, 45% APBN dipergunakan untuk persenjataan yang tidak berdampak pada peningkatan volume arus barang dan jasa.

Pertumbuhan PDB suatu negara akan tumbuh baik ketika stabilitas moneter terjaga. Stabilitas menjadi kata kunci pertama dalam konsep Trilogi Pembangunan di Indonesia. Presiden Soeharto, dalam pidato RAPBN 1977-1978, menegaskan, GBHN mengamanatkan bahwa pembanguna harus mengarah pada kemajuan, kesejahteraan sosial. Untuk menjamin tercapainya sasaran tersebut, kebijakan bertumpu pada trilogi pembangunan, yaitu: stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. "Di atas landasan stabilitas, kita terus mengusahakan pertumbuhan di segala bidang, khususnya pertumbuhan ekonomi. Dengan ekonomi yang tumbuh, dengan keuangan negara yang lebih sehat, kita akan memiliki lebih banyak alternative kebijakan pembangunan," tegas Soeharto (1977).

Kebijakan stabilitasi dan rehabilitasi, menurut Sri Hadi (2006), menjadi prioritas awal Pemerintahan Orde Baru. Tujuannya untuk mengatasi masalah kelangkaan pangan terganggunya produksi, ekspansi moneter yang berlebihan, hiper inflasi, hilangnya kepercayaan pada rupiah, pengangguran kerusakan infrastruktur, terkurasnya cadangan devisa, hutang LN yang besar, krisis neraca pembayaran dan defisit anggaran. Program rehabilitasi dan stabilitasi dilakukan dengan tiga cara: stabilisasi keamanan, minimalisasi pengeluaran yang tidak produktif, dan penggunaan sumberdaya langka secara efisien

Pemerintah Soeharto, kata Widjojonisastro, menerapkan demokrasi ekonomi yang tidak memberi tempat pada: (1) sistem persaingan bebas (*free fight liberalism*), sistem etatisme dimana aparaturnegara sangat dominan, dan gejala monopoli yang merugikan, baik monopoli negara maupun swasta. Presiden suharto dinilai berhasil mewujudkan stabilitas ekonomi yang tandai dengan stabilnya harga kebutuhan pokok.

Begawan ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo (1972), berpendapat bahwa problema pokok yang dihadapi Indonesia adalah taraf pendapatan, kependudukan, kesempatan

kerja dan devisa negara. Karena itu, dia menyarankan perlunya investasi yang seimbang antara *low investor sector* dan *high earning sector* (seperti perminyakan) demi stabilitas masyarakat. Ada masa dimana kebocoran anggaran cukup tinggi, hingga 30% (Yasin, 2018).

Pada masa orde reformasi, kebijakan moneter dan fiscal dimonitor oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Gubernur BI, Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Di bidang moneter, Bank Indonesia (BI) memfokuskan kebijakan suku bunga dan nilai tukar untuk memperkuat stabilitas eksternal perekonomian, khususnya guna mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. Selama triwulan I 2019, BI mempertahankan suku bunga acuan (BI7DRR) sebesar 6,00%. Bersamaan dengan itu, BI juga menempuh berbagai kebijakan yang lebih akomodatif untuk mendorong permintaan domestik antara lain melalui; *pertama*, strategi operasi moneter untuk meningkatkan ketersediaan likuiditas di pasar melalui transaksi *term-repo* secara regular dan terjadwal, disamping *FX Swap*. *Kedua*, memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan menaikkan kisaran batasan Rasio Intermediasi Makroprudensial menjadi 84-94%. *Ketiga*, mengakselerasi pendalaman pasar keuangan melalui penguatan *market conduct* dan penerbitan ketentuan pelaksanaan instrumen derivatif suku bunga Rupiah. *Keempat*, memperkuat kebijakan sistem pembayaran dengan memperluas elektronifikasi penyaluran bansos, transportasi, dan keuangan pemerintah daerah dan mempersiapkan *QR Indonesia Standard* (QRIS) sebagai standar *QR code payment* di Indonesia untuk memperluas interkoneksi dalam mendukung ekosistem ekonomi keuangan digital (KKSK, 2019).

Di bidang fiskal, kinerja APBN secara umum menunjukkan tren positif, baik di sisi pendapatan maupun belanja negara, yang akan mendukung pencapaian target pembangunan 2019. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola keuangan negara dengan pruden dan transparan. Dengan APBN yang kredibel, diharapkan Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan, termasuk dalam mengantisipasi kondisi perekonomian global yang masih diliputi perlambatan.

OJK memandang bahwa SSK masih terjaga dengan baik yang didukung oleh tingkat permodalan dan likuiditas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang memadai. Kinerja intermediasi LJK juga tumbuh positif dengan tingkat risiko yang *manageable*. OJK mendukung peran aktif dari sektor jasa keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, antara Lain dengan memperluas pendalaman pasar, meningkatkan kapasitas pelaku di industri keuangan, dan mengembangkan program pembiayaan sektor jasa keuangan yang berkelanjutan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai tren kenaikan suku bunga simpanan secara umum sudah melandai dan stabil, sejalan dengan membaiknya kondisi likuiditas perbankan. Selanjutnya LPS juga melakukan pemantauan dari sisi *coverage* penjaminan baik nominal dan rekening di mana data terakhir dinilai masih memadai untuk mendukung kepercayaan nasabah kepada sistem perbankan.

Menyambut bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri, KSSK membangun sinergi dan koordinasi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan uang tunai masyarakat, Lancarnya transaksi sistem pembayaran serta layanan jasa keuangan lainnya (KKSK, 2019).

Dalam rapat terakhir (30 Juli 2019), KKSK menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan kuartal II/2019 terjaga dengan baik. Dalam rapat yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur

Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS, KSSK melakukan pemantauan terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan.

Dalam siaran pers (30/7/2019), KSSK memandang stabilitas sistem keuangan domestik tetap baik, ditopang industri perbankan yang tetap sehat dan pasar keuangan domestik yang kondusif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor yakni pertama, menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global yang dipicu respons sejumlah bank sentral di negara maju dan negara berkembang yang melonggarkan kebijakan moneter, termasuk bank sentral AS yang diprediksi akan menurunkan suku bunga kebijakan moneter.

Kedua, menariknya imbal hasil investasi portofolio di aset keuangan domestik. Ketiga, membaiknya persepsi terhadap prospek ekonomi Indonesia, seiring dengan peningkatan sovereign rating Indonesia oleh S&P. Berbagai perkembangan positif ini mendorong aliran modal asing ke Indonesia yang pada gilirannya memperkuat rupiah serta meningkatkan kinerja pasar obligasi negara dan pasar saham.

Kendati demikian, KSSK mencatat beberapa perkembangan eksternal dan domestik yang harus diwaspadai seperti perang dagang dan prospek pertumbuhan ekonomi global. Adapun dari sisi domestik, KSSK melihat bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah mempertahankan momentum pertumbuhan serta memperbaiki defisit transaksi berjalan di tengah melemahnya perekonomian global.

Ragam Sistem Anggaran

Menurut Halim dan Kusufi (2016: 68), proses penganggaran merupakan hal yang tidak terpisah dari pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, dalam membahas perkembangan sistem anggaran di pemerintahan akan selalu terkait dengan perubahan undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan. Sebelum terdapat undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara, sistem anggaran yang ada di Indonesia masih menggunakan sistem anggaran turunan dari kolonial Belanda. Perkembangan kondisi politik merupakan salah satu faktor pendorong berubahnya kebijakan yang ada dan berdampak pada pembentukan undang-undang termasuk didalamnya membahas pengelolaan keuangan negara.

Dengan demikian, sejak Indonesia merdeka setidaknya sudah berlaku empat sistem anggaran. Yaitu sistem anggaran berbasis program, anggaran berimbang, anggaran terpadu, dan anggaran berbasis kerja (Frida Fanani Rohma, 2017). Sistem anggaran berbasis program pertama kali dipakai di Amerika Serikat tahun 1960-AN. Sebagian ahli menyebutnya sebagai sistem anggaran lama karena diterapkan pada masa Orde Lama sampai periode awal Orde Baru. Atau berlaku sebelum ada UU yang mengaturnya. Anggaran dibuat berdasarkan program prioritas berdasarkan hasil pertimbangan lembaga perencanaan dan kementerian terkait.

Pada periode ini, proses penyusunan anggaran masih menggunakan sistem tradisional dengan berdasarkan pada pendekatan inkremental dan line item, pertanggungjawaban ditekankan pada setiap input. Sistem pembukuan yang dilakukan masih menggunakan tata buku tunggal berbasis kas, penyusunan anggaran dan pembukuan saling berhubungan dan mempengaruhi mengakibatkan penghitungan anggaran membutuhkan waktu lama, Halim dan Kusufi (2016: 70).

Memasuki Repelita II, Pemerintahan Orde baru menerapkan sistem anggaran berimbang. Yakni APBN disusun berdasarkan kemampuan penerimaan negara. Jadi belanja pembangunan disesuaikan dengan perkiraan kemampuan penerimaan negara. Ketika program termasuk kategori prioritas pembangunan, untuk menutupinya, negara melakukan pinjaman melalui utang luar

negeri. Masa ini berlaku mulai 1975, setelah ada UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah yang didukung oleh beberapa aturan pelaksanaan lainnya, Halim dan Kusufi (2016: 69). Kebijakan ini berlaku hingga akhir masa Orde Baru.

Memasuki era Reformasi, berlaku sistem anggaran terpadu sebagai amanah dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang didukung oleh beberapa aturan pelaksanaan lainnya, Halim dan Kusufi (2016: 71). Beberapa inti pembahasan di era reformasi, yang terkait dengan sistem anggaran yaitu adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sehingga sistem penganggaran mulai menerapkan anggaran kinerja yang penekanan pertanggungjawaban didasarkan pada output dan outcome, adanya penerapan value for money yang menekankan pada ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Inti penting lainnya yaitu diterapkannya konsep pertanggungjawaban yang terdiri dari pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba dan pusat investasi. Selain itu juga terjadi perubahan dalam sistem akuntansi pemerintahan yang mulai menerapkan double entry dengan berbasis kas modifikasi, Halim dan Kusufi (2014: 5-6)

Selanjutnya, berlaku sistem anggaran berbasis kinerja. Ini merupakan konsekuensi dari hadirnya tiga paket undang-undang: yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Sistem anggaran berbasis kinerja yang diungkapkan secara jelas dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Bab 3 dalam pasal 11 sampai dengan pasal 15 dan dalam penjelasan atas UU No. 17 Tahun 2003 Bagian 1 Nomor 6 paragraf keempat.

Studi Terdahulu

Studi terdahulu dilakukan oleh Dedi Junaedi (2018) yang membahas relasi antara utang luar negeri dengan perekonomian (PDB) dan kemiskinan di Indonesia. Menurut Dedi Junaedi (Simposium Nasional Keuangan Negara 2018), utang luar negeri memiliki korelasi dengan terhadap kondisi ekonomi-an nasional, khususnya nilai Produksi Domestik Bruto Indonesia dan tingkat kemiskinan. Utang cenderung meningkatkan nilai PDB dan menurunkan angka kemiskinan. rakyat banyak. Ini berlaku untuk semua rezim pemerintahan.

Penelitian Dedi Junaedi (2018) juga menyimpulkan bahwa dalam hal tata kelola utang sebagai pendorong perekonomian dan kemiskinan, Era Soeharto dan Era Habibie cenderung berbeda dan lebih baik dari Era Soekarno. Sementara tatakelola utang Era Abdurrahman Wahid, Era Megawati Soekarnoputeri, Era Susilo Bambang Yudhoyono dan Era Jokowi tidak berbeda atau tidak lebih baik dari Era Soekarno. Meski secara nasional dapat meningkatkan PDB dan menurunkan kemiskinan, utang tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat (baca pendapatan perkapita). Utang luar negeri bahkan cenderung menurunkan tingkat kesejahteraan.

Guncangan risiko global dapat sangat mengganggu stabilitas pasar keuangan dan, jika tidak ada respons kebijakan yang memadai, dapat memicu resesi parah. Caballero dan Kamber (2019) mendokumentasikan bahwa kebijakan tidak konvensional diadopsi oleh bank sentral efektif dalam menahan penurunan harga aset mengikuti *episode risk-off*.

Kebijakan-kebijakan ini berdampak pada jangka panjang dan menginspirasi kepercayaan diri dalam kerangka kebijakan yang mengurangi persistensi guncangan *risk-off*. Kedua ekonom AS itu juga menunjukkan kondisi ekonomi makro dan keuangan domestik memainkan peran kunci dalam mendapatkan manfaat dari limpahan kebijakan ini selama *episode risk-off*.

Penelitian Syeda dan Shaikh (2013) membuktikan variabel makroekonomi berdampak nyata terhadap terhadap PDB Pakistan. Dalam periode 1990-2011, PDB cenderung meningkat. Pemantiknya adalah stabilitas harga, membaiknya layanan publik, perbaikan infrastur pertanian, perkembangan perikanan & pertambangan, serta membaiknya pendidikan yang menggeser usaha rakyat dari pertanian ke sektor non pertanian.

Tahun 2016 dan 2017, rasio utang terhadap PDB di Italia sudah mencapai 131,8% dari PDB, jauh di atas nilai referensi SGP 60%. Atas dasar tu, Komite Eropa (EC, 2018) meminta agar berupaya mengurangi rasio utang pada tahun-tahun berikutnya. Komisi Eropa (EC) meminta Italia untuk memangkas pengeluaran pemerintah primer sekitar 0,2-0,6% dari PDB. Melalui rapat tahunan Dirjen Ekonomi dan Keuangan pada Mei 2018 di Brussel, Belgia, Komisi Eropa (EC, 2018) merekomendasikan Italia agar memastikan bahwa tingkat pertumbuhan nominal pengeluaran pemerintah tidak melebihi 0,1%. Sebaliknya menjaga program stabilitas diupayakan meningkat hingga 0,7% dari PDB. Jika tidak, PDB Italian akan semakin memburuk, dari tumbuh 0,3% menjadi -2,0%.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel jenuh. Data yang digunakan umumnya merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), *World Bank*, dan sumber-sumber referensi lain dalam bentuk buku, jurnal maupun publikasi lainnya. Data yang dikumpulkan berupa data inflasi, BI Rate, nilai tukar (kurs), utang luar negeri, pembiayaan, investasi langsung, populasi, serta data Produk Domestik Bruto (PDB) dan PDB perkapita. Data tersebut berupa data *time series* dari periode 1990-2019.

Data yang terkumpul selanjutnya dikelompokkan menjadi variabel terikat (*dependen*) dan variabel bebas (*independen*). Variabel terikat adalah jumlah penduduk miskin dan nilai PDB (US\$). Sedang variabel bebas adalah ada sepuluh, yaitu jumlah utang (US\$), jumlah uang beredar (M1M2), tingkat inflasi, APBN, pembiayaan, investasi, nilai tukar (kurs), BI-rate, ekspor, impor, dan *variable dummy* periode rezim sistem anggaran (anggaran berimbang, anggaran terpadu, dan anggaran berbasis kinerja).

Untuk melihat perbandingan pengelolaan stabilitas fiskal moneter dalam setiap era pemerintahan, dibuat dua *dummy* variable, yaitu; Budget1 (membandingkan sistem anggaran prioritas dengan anggaran berimbang) dan Budget2 (membandingkan sistem anggaran berbasis kinerja dengan anggaran berimbang). Ada pun hipotesisnya sebagai berikut:

Hipotesis I

H10 Stabilitas moneter tidak berpengaruh terhadap perekonomian nasional

H11 Stabilitas moneter berpengaruh terhadap perekonomian nasional

Hipotesis 2

H20 Perbedaan rezim pemerintahan tidak berpengaruh dalam tata kelola stabilitas moneter dalam mendukung pencapaian perekonomian nasional

H21 Perbedaan rezim pemerintahan berpengaruh dalam tata kelola stabilitas moneter dalam mendukung pencapaian perekonomian nasional

Data olahan dianalisis secara kuantitatif deskriptif dengan model regresi berganda dengan *dummyvariable*. Pengaruh stabilitas moneter terhadap perekonomian (PDB) dapat diketahui dengan mengajukan Model Ekonometrika (PDB dan PCI) sebagai berikut:

$$PDB = \beta_0 + \beta_1 M1M2 + \beta_2 \text{Inflasi} + \beta_3 \text{Kurs} + \beta_4 \text{Investasi} + \beta_5 \text{Pembiayaan} + \beta_6 \text{BIRate} + \beta_7 \text{APBN} + \beta_8 \text{Ekspor} + \beta_9 \text{Impor} + \beta_{10} \text{Utang LN} + \beta_{11} \text{Budget1} + \beta_{12} \text{Nudget2} + \epsilon$$

PDB adalah variabel nilai produk domestik bruto (GDP) tahunan. Uang beredar adalah jumlah uang M1+M2. Kurs adalah nilai tukar rupiah per dolar AS. Inflasi adalah tingkat inflasi tahunan. Investasi umlah investasi langsung (FDI). Pembiayaan adalah nilai pembiayaan yang ditawarkan lembaga keuangan. BI-rate adalah suku bunga acuan yang ditetapkan BI. APBN adalah jumlah belanja atau pengeluaran pemerintah. Ekspor adalah nilai ekspor tahun berjalan. Impor adalah nilai impor tahun berjalan. Utang adalah indikator utang luar negeri dinyatakan dalam satuan persen. Populasi adalah jumlah penduduk Indonesia pada tahun berjalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

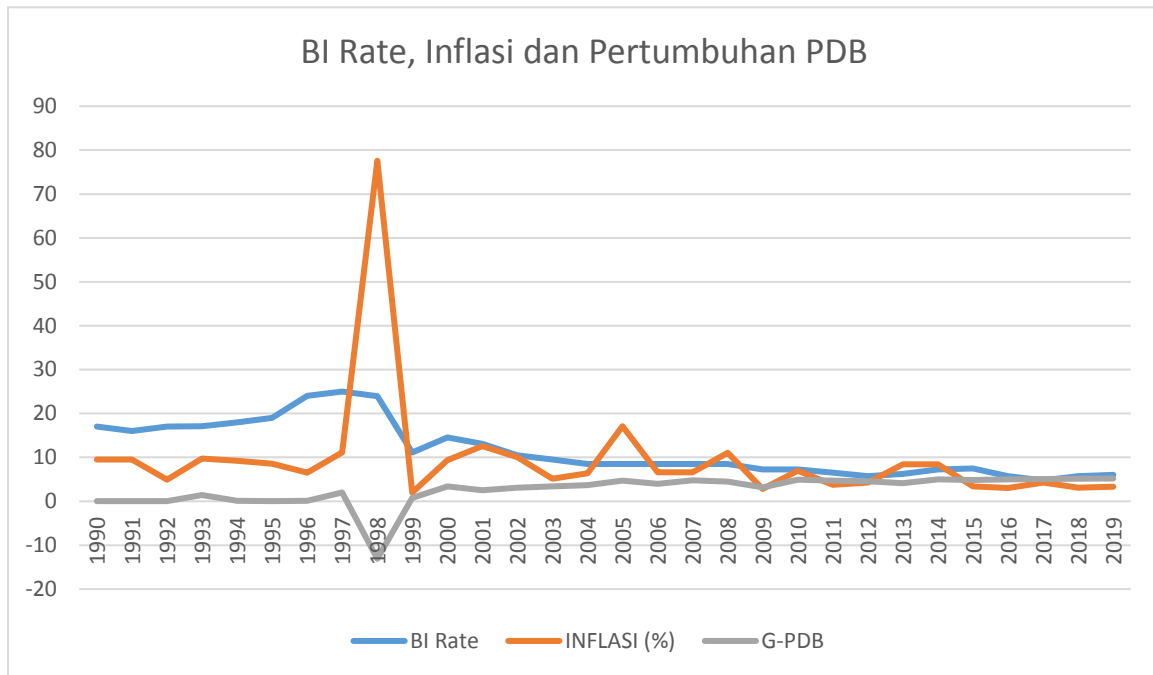
Data Stabilitas Moneter dan PDB Indonesia

Kondisi stabilitas moneter di Indonesia bersifat dinamis. Hal ini dapat tercermin dalam dinamika perkembangan sejumlah indikator ekonomi dan keuangan nasional. Antara lain suku bunga acuan (BI Rate), nilai tukar (kurs rupiah), tingkat inflasi, jumlah uang beredar, jumlah utang, rasio utang terhadap PDB, jumlah pembiayaan, dan jumlah investasi. Selama kurun waktu 1990-2019, nilai indikator stabiitas tersebut umumnya fluktuatif dari masa ke masa.

Tabel 1. Indikator Stabilitas Moneter

Tahun	Rasio Utang/PDB	UTANG-RP (milyar)	KURS\$ (Rp/US\$)	DEBT-\$ (Juta US\$)	BIRATE	Uang Beredar (Milyar)	INFLASI (%)	Sistem Anggaran
1990	90.58	9,134.5	1,842	4.959	17.00	84,630	9.53	Berimbang
1991	85.11	9,305.8	1,842	5.052	16.00	99,059	9.52	Berimbang
1992	91.96	10,656.0	1,842	5.785	17.00	119,053	4.94	Berimbang
1993	40.56	11,341.2	1,842	6.157	17.09	145,599	9.77	Berimbang
1994	37.11	11,319.1	1,842	6.145	18.00	174,512	9.24	Berimbang
1995	45.13	14,870.5	2,248	6.615	19.00	223,300	8.60	Berimbang
1996	167.56	60,010.4	2,248	26.695	24.00	288,632	6.50	Berimbang
1997	83.19	89,920.4	2,350	38.264	25.00	355,643	11.10	Berimbang
1998	120.7	1,154,160.0	16,800	68.7	23.97	577,381	77.60	Berimbang
1999	78.39	859,300.0	6,500	132.2	11.16	646,205	2.00	Terpadu
2000	99.40	1,257,442.5	9,725	129.3	14.54	747,028	9.40	Terpadu

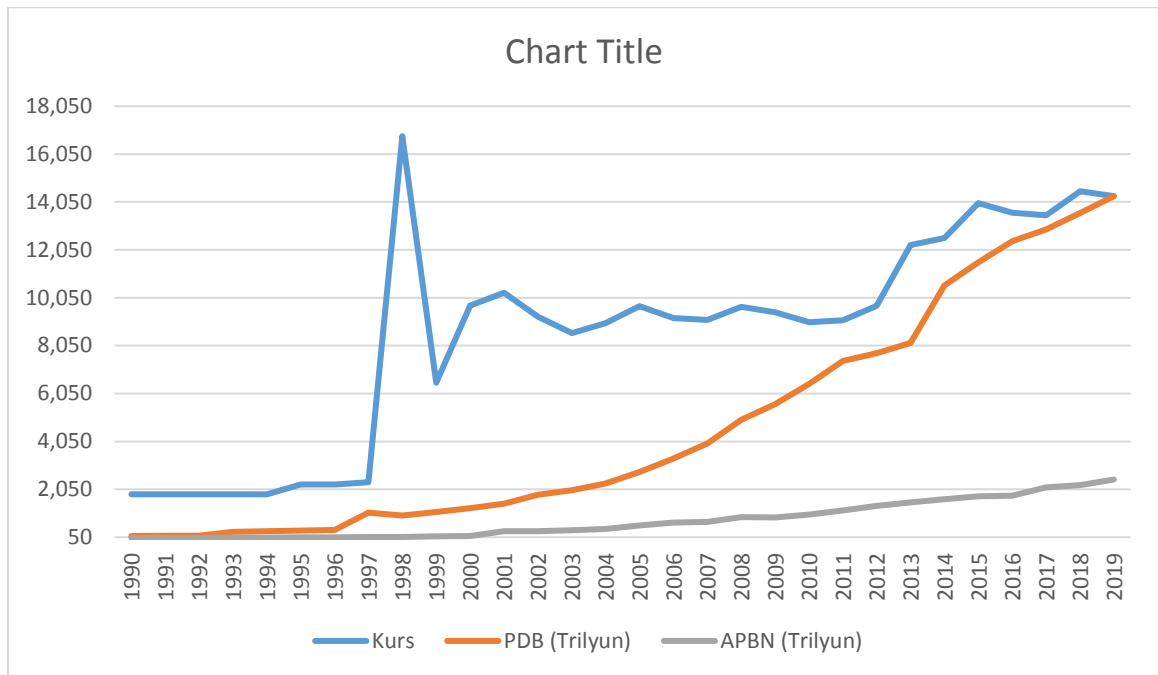
2001	86.62	1,255,409.5	10,265	122.3	13.06	844,053	12.55	Terpadu
2002	69.58	1,267,694.0	9,260	136.9	10.50	883,908	10.03	Terpadu
2003	57.62	1,160,378.0	8,570	135.4	9.50	955,692	5.16	Terpadu
2004	55.29	1,269,311.0	8,985	141.27	8.50	1,033,877	6.40	Terpadu
2005	47.08	1,305,322.5	9,705	134.5	8.50	1,202,762	17.11	Berbasis Kinerja
2006	36.54	1,220,196.0	9,200	132.63	8.50	1,382,493	6.60	Berbasis Kinerja
2007	32.53	1,288,267.5	9,125	141.18	8.50	1,649,662	6.59	Berbasis Kinerja
2008	30.29	1,499,003.3	9,666	155.08	8.50	1,895,839	11.06	Berbasis Kinerja
2009	29.13	1,633,102.9	9,447	172.87	7.25	2,141,384	2.78	Berbasis Kinerja
2010	28.37	1,828,976.8	9,036	202.41	7.25	2,471,206	6.96	Berbasis Kinerja
2011	27.66	2,051,974.2	9,113	225.17	6.50	2,877,220	3.79	Berbasis Kinerja
2012	31.74	2,452,531.7	9,718	252.37	5.75	3,307,508	4.30	Berbasis Kinerja
2013	39.97	3,259,847.5	12,250	266.11	6.25	3,730,409	8.40	Berbasis Kinerja
2014	34.83	3,681,291.5	12,550	293.33	7.25	4,173,327	8.40	Berbasis kinerja
2015	37.24	4,350,220.0	14,000	310.73	7.50	4,548,800	3.40	Berbasis kinerja
2016	34.76	4,312,424.0	13,600	317.09	5.75	5,004,977	3.00	Berbasis kinerja
2017	35.07	4,526,550.0	13,500	335.3	4.75	5,419,165	4.30	Berbasis kinerja
2018	40.26	5,470,974.6	14,500	377.30859	5.75	5,760,046	3.13	Berbasis kinerja
2019	39.21	5,603,134.5	14,300	391.82759	6.00	5,918,515	3.32	Berbasis kinerja



Gambar 1. Perkembangan BI-Rate, Inflasi dan G-PDB Indonesia

Sebagaimana tampak dalam grafis Gambar 1., inflasi Indonesia masih bertahan di bawah 10% pada kurun 1990-1996, melesat tinggi pada masa krisis moneter 1997-1999, berfluktuasi turun-naik pada periode 2000-2008, kemudian cenderung turun dan bertahan sekitar 5% pada periode 2010-2019. Pertumbuhan PDB (G-PDB) relative rendah pada kurun waktu 1990-1997, kemudian turun drastic tahun 1998, meningkat lagi tahun 1999-2000, kemudian cenderung bertahan pada angka 4-5% pada periode setelahnya.

Suku bunga acuan (BI- Rate) cenderung bertahan tinggi pada 1990-1997, kemudian turun hingga 7% pada periode 1998-2000, kemudian cenderung turun hingga 6% pada kurun setelahnya, 2001-2019.



Gambar 2. Perkembangan Kurs, PDB dan APBN Indonesia.

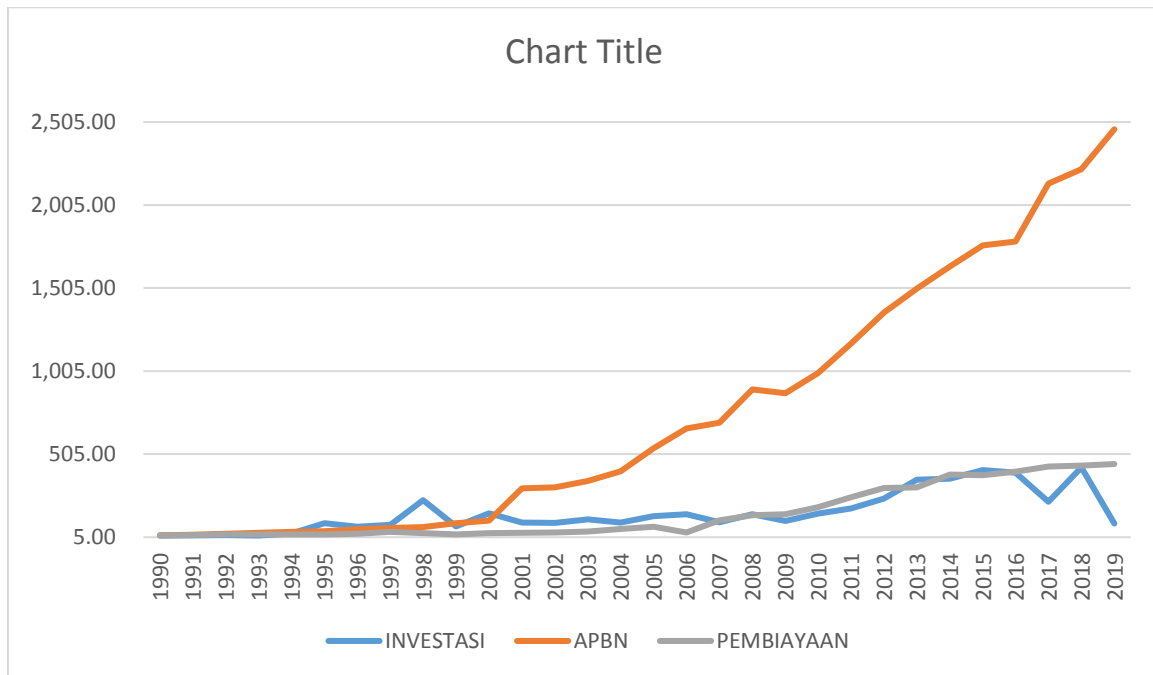
Indikator nilai tukar (kurs rupiah terhadap dolar) terbing stabil pada kurun waktu 1990-1996, kemudian melemah tajam pada 1998 hingga melebihi 16.800, kemudian menguat tajam pada 1999 (era Pemerintahan Habibie) hingga mendekati 6.500, kemudian melemah lagi era Megawati hingga 9000-10000, menguat danbertahan selama era SBY sampai 2012, selanjutnya melemah terus hingga era Jokowi pada level 12.000 – 14.000 per dolar AS.

Sebaliknya, pada kurun waktu 1990-2019, APBN dan PDB cenderung terus meningkat dari masa ke masa. Peningkatan PDB tampak lebih tajam dari pada peningkatan nilai APBN yang meningkat terus tapi pelan.

Tabel 2 Data Investasi, Pembiayaan, PDB, APBN, Populasi, Angka Kemiskinan

Tahun	INVESTASI (Triyun)	JMISKIN (Juta)	RMISKIN (%)	PDB (Tilyun)	PDB-KAPITA (Juta)	APBN (Trilyun)	BIAYA (Milyar)
1990	16.12	27.20	15.16%	100.85	0.56	16.16	14.986
1991	16.17	27.00	14.63%	109.33	0.59	19.65	18.661
1992	19.00	26.00	13.84%	115.87	0.62	25.75	21.695
1993	15.00	25.90	13.57%	279.61	1.46	30.71	22.737
1994	28.47	24.00	12.38%	305.00	1.57	36.62	22.524
1995	89.73	23.00	11.81%	329.47	1.69	41.44	21.426
1996	67.29	22.90	11.46%	358.15	1.79	52.38	26.695

1997	79.51	34.01	16.77%	1,080.95	5.33	61.29	38.264
1998	227.86	49.50	24.06%	955.75	4.65	66.49	29.534
1999	70.79	47.97	23.00%	1,099.70	5.27	89.20	22.231
2000	149.96	38.74	18.32%	1,265.00	5.98	104.61	29.391
2001	92.67	37.87	17.66%	1,449.40	6.76	299.85	30.848
2002	90.65	38.39	17.65%	1,821.83	8.38	305.15	33.937
2003	113.19	37.34	16.93%	2,013.67	9.13	342.81	38.328
2004	92.36	36.15	16.17%	2,295.83	10.27	400.96	54.897
2005	131.79	35.10	15.48%	2,772.28	12.23	540.13	67.647
2006	143.74	39.40	17.15%	3,339.48	14.53	659.12	32.644
2007	94.37	37.17	15.95%	3,957.40	16.98	694.09	107.637
2008	143.75	34.96	14.80%	4,948.69	20.95	894.99	137.24
2009	102.17	32.53	13.59%	5,606.20	23.43	871.00	142.54
2010	146.52	31.02	12.79%	6,446.85	26.58	992.40	186.35
2011	177.47	30.12	12.26%	7,419.19	30.20	1,169.91	245.3
2012	238.72	29.25	11.75%	7,727.08	31.04	1,358.21	302.08
2013	350.56	28.17	11.18%	8,156.27	32.37	1,502.01	306.01
2014	358.05	28.28	11.09%	10,569.70	41.43	1,635.38	381.93
2015	409.86	28.59	11.19%	11,531.70	45.13	1,761.64	379.25
2016	393.91	28.01	10.83%	12,406.80	47.96	1,786.23	400.24
2017	217.83	27.77	10.52%	12,908.40	48.90	2,133.20	429.54
2018	424.96	25.95	9.79%	13,588.80	51.27	2,220.60	435.72
2019	86.95	25.14	9.42%	14,291.30	53.54	2,461.10	445.646



Gambar 3 Perkembangan Investasi, APBN dan Pembiayaan Indonesia

Selama periode 1990-2019, nilai investasi relatif dinamis dengan kecenderungan meningkat hingga 2015. Kemudian terjadi fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pembiayaan cenderung terus meningkat namun pertumbuhannya lebih lambat dari peningkatan APBN.

Pengaruh Stabilitas Moneter terhadap PDB

Dependent Variable: PDB\$

Method: Least Squares

Date: 10/23/19 Time: 17:28

Sample (adjusted): 1 30

Included observations: 30 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KURS\$	-0.022215	0.006413	-3.464250	0.0030
M1M2	0.084884	0.035852	2.367587	0.0300
INVEST\$	1.775625	0.453272	3.917351	0.0011
DEBT\$	0.011735	0.404003	0.029047	0.9772
BI_RATE	7.590894	2.008558	3.779275	0.0015
INFLASI	104.0772	81.38694	1.278795	0.2182
BIAYA	-0.104269	0.176883	-0.589481	0.5633
APBN	0.189659	0.060328	3.143785	0.0059
EKSPOR	-1.39E-05	0.000102	-0.135506	0.8938
IMPOR	-0.000243	0.000142	-1.711366	0.1052
BUDGET1	215.4246	67.90298	3.172535	0.0056
BUDGET2	236.7218	58.70708	4.032254	0.0009
C	210.0224	31.57720	6.651077	0.0000

R-squared	0.997787	Mean dependent var	589.1710
Adjusted R-squared	0.996225	S.D. dependent var	239.7763
S.E. of regression	14.73227	Akaike info criterion	8.516641
Sum squared resid	3689.678	Schwarz criterion	9.123826
Log likelihood	-114.7496	Hannan-Quinn criter.	8.710885
F-statistic	638.7451	Durbin-Watson stat	2.035276
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari hasil analisis Eviews 10, sejumlah variabel bebas yang menjadi indikator stabilitas tampak berpengaruh nyata terhadap perkembangan perekonomian (PDB). Namun begtu, diperlukan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk menyuji kelayakan model ekonometrinya.

Uji Asumsi Klasik

Multikolinieritas

Uji multikolinieritas penting dilakukan dalam statustuik regresi ganda. Termasuk dalam regresi ganda dummy variabel. Ini untuk memastikan tidak adanya pengaruh ganda atau pengauh tumpang tindih dari beberapa variabel bebas yang mungkin saja saling mempengaruhi.

Variance Inflation Factors

Date: 06/10/20 Time: 13:59

Sample: 1 31

Included observations: 30

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
APBN	0.003640	573.9194	289.1051
BIAYA	0.031287	197.8592	103.7314
INVEST\$	0.205455	11.17110	2.317829
BI_RATE	4.034307	94.94492	19.77139
DEBT\$	0.163218	857.6524	310.1073
EKSPOR	1.05E-08	29.92300	11.15001
IMPOR	2.02E-08	36.77561	11.91765
INFLASI	6623.833	23.98178	15.69091
KURS\$	4.11E-05	527.9254	114.4458
M1M2	0.001285	1299.137	619.7939
REZIM1	4610.814	148.7086	114.0099
REZIM2	3446.521	238.1950	119.0975
C	997.1198	137.8253	NA

Dari hasil uji VIF di atas diketahui bahwa dari 10 variabel bebas yang diuji terdapat ada lima variabel yang mengandung multikolinieritas dan lima tidak mengandung multikolinieritas. Tampak nilai VIF M1M2 dan Kurs terlalu besar, maka salah satu (M1M2) dihilangkan dari model. Hasilnya diperoleh model yang lebih baik.

Variance Inflation Factors

Date: 06/10/20 Time: 14:12

Sample: 1 31

Included observations: 30

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
APBN	0.001310	165.4797	83.35845
BIAYA	0.021076	106.7713	55.97690
INVEST\$	0.254572	11.08826	2.300642
BI_RATE	3.970267	74.85083	15.58698
EKSPOR	9.66E-09	22.08302	8.228652
IMPOR	2.18E-08	31.70389	10.27409
INFLASI	5324.812	15.44367	10.10455
KURS\$	3.02E-05	310.3578	67.28062
BUDGET1	1935.271	50.00051	38.33372
BUDGET2	1716.629	95.03910	47.51955
C	1016.288	112.5311	NA

Autokorelasi

Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, melihat nilai Durbin Watson dan membandingkannya dengan nilai dl dan du dalam table standar DW menurut derajat kebebasan dan jumlah sampel. Kedua, dengan uji nilai dengan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test.

Dari cara pertama, kita mendapat nilai DW 2.035. Dari tabel standar DW (sampel 30 dan derajat kebebasan (dk) 9) diperoleh informasi dl = 0.780 du = 2.250. Nilai DW (2,035) terletak di

antara nilai d_1 dan d_u , maka kesimpulannya meragukan alias belum jelas ada atau tidak ada autokorelasi.

Untuk itu diperlukan uji kedua dengan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Berikut adalah ringkasan hasilnya:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.271419	Prob. F(2,17)	0.7655
Obs*R-squared	0.928306	Prob. Chi-Square(2)	0.6287

Tampak nilai probabilitas Chi-Square nya lebih besar dari standar error 0,05. Maka, kesimpulannya, tidak mengandung autokorelasi. Atau dengan kata lain, model sudah memenuhi syarat uji asumsi klasik yang pertama. Yakni terbebas dari autokorelasi.

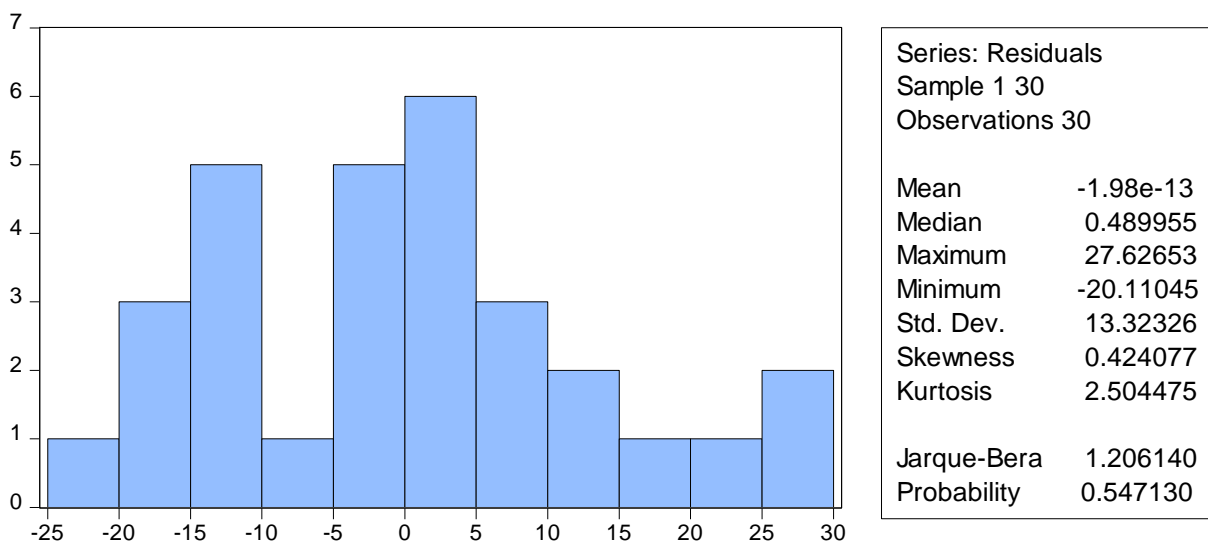
Heteroskedalitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.758302	Prob. F(10,19)	0.6652
Obs*R-squared	8.557742	Prob. Chi-Square(10)	0.5745
Scaled explained SS	4.891280	Prob. Chi-Square(10)	0.8983

Dari uji Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey diperoleh nilai probabilitas Obs*R-Squared lebih dari standar error 0,05. Artinya model tidak mengandung heteroskedalitas alias memenuhi syarat homoskedalitas.

Normalitas



Nilai Jarque Bera dan probabilitas lebih dari standar error 0.05, maka model disimpulkan memenuhi syarat normalitas. Model memenuhi syarat data normal.

Linearitas

Ramsey RESET Test

Equation: UNTITLED

Specification: PDB\$ APBN BIAYA INVEST\$ BI_RATE EKSPOR IMPOR

INFLASI KURS\$ BUDGET1 BUDGET2 C

Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	0.888545	18	0.3860
F-statistic	0.789512	(1, 18)	0.3860
Likelihood ratio	1.287812	1	0.2565

F-test summary:

	Sum of Sq.	df	Mean Squares
Test SSR	216.3029	1	216.3029
Restricted SSR	5147.769	19	270.9352
Unrestricted SSR	4931.466	18	273.9703

LR test summary:

	Value
Restricted LogL	-119.7450
Unrestricted LogL	-119.1011

Nlai probabilitas t dan F statistic lebih besar dari standar 0,05 artinya model memenuhi syarat regresi linear.

Interpretasi Hasil Penelitian

Dari hasil uji asumsi klasik, peneliti mendapatkan model regresi berganda dengan dummy variabel yang sudah memenuhi syarat sebagai berikut:

Dependent Variable: PDB\$

Method: Least Squares

Date: 06/10/20 Time: 14:11

Sample (adjusted): 1 30

Included observations: 30 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
APBN	0.313115	0.036194	8.651137	0.0000
BIAYA	0.198161	0.145177	1.364963	0.1882
INVEST\$	1.843706	0.504552	3.654148	0.0017
BI_RATE	7.838446	1.992553	3.933871	0.0009
EKSPOR	0.000121	9.83E-05	1.234337	0.2321
IMPOR	-0.000373	0.000148	-2.528143	0.0205
INFLASI	-4.720632	72.97131	-0.064692	0.9491

KURS\$	-0.012264	0.005493	-2.232480	0.0378
BUDGET1	167.0236	43.99172	3.796705	0.0012
BUDGET2	181.1681	41.43222	4.372638	0.0003
C	197.6315	31.87928	6.199371	0.0000

R-squared	0.996912	Mean dependent var	589.1710
Adjusted R-squared	0.995287	S.D. dependent var	239.7763
S.E. of regression	16.46011	Akaike info criterion	8.716332
Sum squared resid	5147.769	Schwarz criterion	9.230104
Log likelihood	-119.7450	Hannan-Quinn criter.	8.880692
F-statistic	613.4825	Durbin-Watson stat	2.137362
Prob(F-statistic)	0.000000		

Secara simultan, variabel stabilitas moneter –diwakili variabel APBN, pembiayaan, investasi, BI-rate, ekspor, impor, inflasi, kurs dan perbedaan rezim anggaran -- berpengaruh nyata terhadap perkembangan PDB. Tingkat korelasi antar variabel bebas dan variabel gerikat terbilang sangat kuat dengan R-squared 0,9969%. Artinya variabel-variabel penelitian dapan menjelaskan dinamika PDB sekitar 99,69%, siasnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diterliti.

Secara parsial, dari hasil analisis statistic diperoleh temuan bahwa APBN, investasi, BI-Rate, Impor dan kurs berpengaruh dan perbedaan rezim sistem anggaran berpengaruh nyata terhadap perkembangan PDB. Sementara variabel pembiayaan, ekspor dan inflasi berpengaruh tidak nyata terhadap PDB. Variabel biaya bisa berdampak nyata jika standar error dinaikkan menjadi 19%. Ekspor dapat berpengaruh nyata terhadap PDB jika standa eror dinaikkan menjadi 24%. APBN, investasi, BI-Rate dan perbedaan rezim anggaran berkorelasi positif terhadap PDB. Sementara impor dan kurs berkorelasi negatif terhadap PDB. Model ekonometrnya pengaruh stabilitas oneter dengan PDB adalah sebaga berikut:

$$\text{PDB\$} = 0.3131 \cdot \text{APBN} + 1.8437 \cdot \text{INVEST\$} + 7.8384 \cdot \text{BI_RATE} - 0.00037 \cdot \text{IMPOR} - 0.01226 \cdot \text{KURS\$} + 167.02356 \cdot \text{BUDGET1} + 181.1681 \cdot \text{BUDGET2} + 197.6315$$

Dari model ekonometrik tersebut, peneliti dapat menafsirkan hasil riset sebagai berikut:

1. Jika APBN, investasi, BI-Rate, impor, kurs stagnan dan sistem anggaran menggunakan oendekatan lama (anggaran berimbang), PDB Indonesia akan diraih sekitar 197,6315 trilyun dolar.
2. Jika APBN naik 1 trilyun, maka PDB berpotensi akan meningkat sebesar 313 milyar. Jika APBN turun 1 trilyun, maka PDB berpotensi akan menurun sekiar 313 milyar.
3. Jika BI-rate naik 1 poin, maka PDB akan meningkat 7,8384 trilyun. Sementara jika BI-rate dirutunkan 1 oin, maka PDB berpotensi menurun sebesar 7,8384 trilyun.
4. Jika impor meningkat 1 trilyun, maka PDB akan berpotensi turun sebesar 0,37 milyar. Jika impor turun 1 trilyun, maka PDB akan meningkat 0,37 milyar.
5. Jika kurs rupiah terhadap dolar naik (nilai tukar rupiah melemah), maka PDB cenderung turun sebear 12,26 milyar. Sebaliknya, jika rupiah menguat (nilai kurs rurun) 1 poin, maka PDB cenderung meningkat 12,26 milyar.
6. Jika sistem anggaran terpadu diberlakukan dalam tatakelola perekonomian Indonesia, maka PDB cenderung lebih baik sekitar 167 kali dibanding jika menggunakan sistem anggaran berimbang.

7. Jika sistem anggaran berbasis kinerja diberlakukan dalam tatakelola perekonomian Indonesia, maka PDB akan lebih baik sekitar 181 kali dibanding jika menggunakan sistem anggaran berimbang.

Secara relatif, penggunaan sistem anggaran terpadu dan berbasis kinerja lebih baik dari sistem anggaran berimbang. Demikian juga sistem anggaran berbasis kinerja juga lebih baik secara relatif dibanding sistem anggaran terpadu. Artinya, pembaruan sistem anggaran di Indonesia sudah berada pada jalur yang benar.

Hasil penelitian ini menkonfirmasi temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dedi Junaedi, Rio Kartika Supryatna dan Evinovita (2019). Penelitian mereka yang berjudul Pengaruh Stabilitas Moneter terhadap Perekonomian Indonesia: Studi Komparasi Antarrezim Pemerintahan menggunakan data time seri dari tahun 1949-2009: Hasilnya adalah sebagian indikator stabilitas moneter (uang beredar, kurs, BI rate, investasi, impor, dan APBN) berpengaruh nyata terhadap perekonomian (PDB). Sementara inflasi, pembiayaan dan utang luar negeri tidak berpengaruh nyata terhadap pencapaian PDB. Rezim pemerintahan era Reformasi (BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarniputeri, Soesilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo) berbeda dengan pemerintahan era Orde Baru (Soeharto) dalam tatakelola stabilitas terhadap pencapaian PDB. Model ekonometrinya $PDB\$ = 178.54196 + 0.09995 * M1M2 - 0.018614 * KURS\$ + 9.587177 * BI_RATE + 1.193015 * INVEST\$ - 0.0002245 * IMPOR + 0.1810037 * APBN + 182.4882 * BUDGET1 + 171.0377 * BUDGET2 + 199.8609 * REZIM3 + 214.5996 * REZIM4 + 173.7841 * REZIM5$.

Sebagian indikator stabilitas moneter (uang beredar, kurs, BI rate, investasi, impor, dan APBN) juga berpengaruh nyata terhadap PDB perkapita. Sementara inflasi, pembiayaan dan utang luar negeri tidak berpengaruh nyata terhadap pencapaian PDB perkapita. Rezim pemerintahan era Reformasi (BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarniputeri, Soesilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo) berbeda dengan pemerintahan era Orde Baru (Soeharto) dalam tatakelola stabilitas terhadap pencapaian PDB perkapita. Model ekonometrinya: $PDBKAPITA\$ = 5.7594 + 0.0032 * M1M2 - 0.0006 * KURS\$ + 0.3092 * BI_RATE + 0.0385 * INVEST\$ - 0.0000072 * IMPOR + 0.00584 * APBN + 5.8867 * BUDGET1 + 5.5173 * BUDGET2 + 6.4471 * REZIM3 + 6.9226 * REZIM4 + 5.6059 * REZIM5$. (Junaedi, Kartika, Evinovita, 2019).

Dedi Junaedi dan Faisal (2019) juga meneliti pengaruh perbedaan rezim anagram dalam tatakelola utang luar negeri dalam menata perekonomian dan pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian keduanya menunjukkan bahwa utang luar negeri dan tingkat inflasi memiliki korelasi dengan terhadap kondisi perekonomian nasional, khususnya nilai Produksi Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan tingkat kemiskinan. Utang dan inflasi cenderung meningkatkan nilai PDB dan menurunkan angka kemiskinan. Ini berlaku untuk semua rezim sistem anggaran pemerintahan. Perbedaan rezim sistem angrgran berpengaruh nyata dan positif dalam hal tata kelola utang sebagai pendorong perekonomian dan pengentasan kemiskinan, dalam pencapaian PDB, rezim anggaran berbasis kinerja, rezim anggaran terpadu dan anggaran berimbang berdampak lebih baik dari lebih baik dari rezim anggaran berbasis program. Urutan sistem anggaran terbaik adalah: anggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu, anggaran berimbang dan anggaran berbasis program. Dalam pengentasan kemiskinan, rezim anggaran berimbang, anggaran berbasis kinerja dan anggaran terpadu lebih dari dari rezim anggaran berbasis program. Urutan sistem anggaran terbaik untuk mendukung pengentasan kemiskinan adalah sistem anggaran berimbang, anggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu dan anggaran berbasis program.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Variabel stabilitas moneter –diwakili variabel APBN, pembiayaan, investasi, BI-rate, ekspor, impor, inflasi, kurs dan perbedaan rezim anggaran – secara simultan berpengaruh nyata terhadap perkembangan PDB. Tingkat korelasi antar variabel bebas dan variabel gerikat terbilang sangat kuat dengan R-squared 0,9969%. Artinya variabel-variabel penelitian dapan menjelaskan dinamika PDB sekitar 99,69%, siasnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diterlti.

Secara parsial, dari hasil analisis statistic diperoleh temuan bahwa APBN, investasi, BI-Rate, Impor dan kurs berpengaruh dan perbedaan rezim sistem anggaran berpengaruh nyata terhadap perkembangan PDB. Sementara variabel pembiayaan, ekspor dan inflasi berpengaruh tidak nyata terhadap PDB. Variabel biaya bisa berdampak nyata jika standar erorr dinaikkan menjadi 19%. Ekspor dapat berpengaruh nyata terhadap PDB jika standa eror dinaikkan menjadi 24%. APBN, investasi, BI-Rate dan perbedaan rezim anggaran berkorelasi positif terhadap PDB. Sementara impor dan kurs berkorelasi negatif terhadap PDB. Model ekonometrnya pengaruh stabilitas oneter dengan PDB adalah sebaga berikut: $PDB\$ = 0.3131*APBN + 1.8437*INVEST\$ + 7.8384*BI_RATE - 0.00037*IMPOR - 0.01226*KURS\$ + 167.02356*BUDGET1 + 181.1681*BUDGET2 + 197.6315$.

Secara relatif, penggunaan sistem anggaran terpadu dan berbasis kinerja lebih baik dari sistem anggaran berimbang. Demikian juga sistem anggaran berbasis kinerja juga lebih baik secara relatif dibanding sistem anggaran terpadu. Artinya, pembaruan sistem anggaran di Indonesia selama ini sudah berada pada jalur yang benar.

Saran

1. Tatakelola dan kualitas pembiayaan perlu diperbaiki dan dicari model pembiayaan yang sedapat mungkin berdampak produktif bagi perekonomian nasional.
2. Untuk sementara sistem berbasis kinerja masih layak dipertahankan. Tetapi, ke depan, sistem anggaran perlu terus diperbaharui agar efektif dan efisien membawa dampak optimal bagi perbaikan kualitas pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Raja Nurul Aini dan Azmi, Amalina. 2017. *Factor Affecting Gross Domestic Product (GDP) Growth in Malaysia*. International Journal of Real Estate Studies: Volume 11, Number 4 2017.
- Bank Indonesia. 2019. *Indikator Terpilih Moneter dan Sistem Pembayaran*. Data statistik diambil dari portal <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator-terpilih-moneter-sistem-pembayaran/Default.aspx> pada 20 Agustus 2019.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Data Ekspor Impor*. Data diakses dari portal <https://bps.go.id/subject/8/ekspor-impor.html#subjekViewTab3> tanggal 30 Juli Pukul 10.30.
- Caballero, Ricardo Caballero dan Gunes Kamber. 2019. *The global impact of risk-off shocks*. BIS Papers No 102. *Joint conference of the Bank of Korea and the Bank for International Settlements on "Asia-Pacific fixed income markets: evolving structure, participation and pricing"*, Seoul, Korea, 19-20 November 2018, pp17-23.

- Diamond, Arthur M. Jr. 2006. *Measurement, incentives and constraints in Stigler's economics of science*. *The European Journal of the History of Economic Thought: Volume 12, Issue 4*.
- Dornbusch R dan Fischer S. 1996. *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Anning, Lucy; Ofori, Collins F.; dan Affum, Ernest K. 2016. *The Impact of Government Debt on the Economic Growth of Ghana: A Time Series Analysis from 1990-2015*. *International Journal of Innovation and Economic Development: Volume 2, Issue 5, December 2016*, pp31-39
- Dynan, Karen dan Sheiner, Louise. 2018. *GDP as a Measure of Economic Well being*. Hutchins Center Working Paper #43. Paper diambil dari situs <https://www.-brookings.edu/research/gdp-as-a-measure-of-economic-well-being>.
- European Commission. 2018. *Assessment of the 2018 Stability Programme for Italy*. DG Ecf:in: Brussel.
- Eur-Lex.europa. 2012. *The requested document does not exist*. - EUR-Lex. eur-lex.europa.eu.
- Feldstein, Martin. 2017. *Underestimating the Real Growth of GDP, Personal Income, and Productivity*. *Journal of Economic Perspectives*, Volume 31, Number 2, Spring 2017, pp145-164.
- Gadanecz, Blaise and Jayaram, Kaushik. 2009. *Measures of financial stability – a review*. Irving Fisher Committee (IFC) Bulletin No 31, 2009. pp365-380
- Grauwe, Paul De (2005). *Economics of monetary union* (6th ed.). Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-927700-1.
- Guardian. 2003. *What is the stability and growth pact?* Berita online diakses dari portal <https://www.theguardian.com/world/2003/nov/27/qanda.business> pada 25 Juli 2019.
- Hadi, Sri. 2006. *Mengenang Prestasi Ekonomi Indonesia 1966-1990n*. Jakarta: Penerbit UI.
- IMF-World Bank. *Spring Meetings IMF-World Bank 2019*, 8-14 April. Washington DC: IMF/WB. Diakses online pada portal <http://meeteings.imf.org/en/2019/spring> pada tanggal 30 Juli 2019.
- Jain, Dhiraj; Nair, K. Sanal; dan Jain, Vaishali. 2015. *Factors Affecting GDP (Manufacturing, Services, Industry): An Indian Perspective*. *Annual Research Journal of Symbiosis Centre for Management Studies*, Pune Vol. 3, April 2015, pp38-56.
- Junaedi, Dedi. 2018. *Hubungan Antara Utang Luar Negeri dengan Perekonomian dan Kemiskinan: Komparasi Antarrezim Pemerintahan*. Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara 2018. Jakarta: Badan Diklat Kementerian Keuangan.
- Junaedi, Dedi; Supriyatna, Rio Kartika, & Evinovita. Pengaruh Stabilitas Moneter terhadap Perekonomian Indonesia; Studi Komparasi Antarrezim Pemerintahan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Islam: Volume 1, Nomor 2, 2019*.
- Kira, Alex Reuben. 2013. *The Factors Affecting Gross Domestic Product (GDP) in Developing Countries: The Case of Tanzania*. *European Journal of Business and Management*, Vol.5, No.4, 2013. Tersedia versi cetak (P-ISSN 2222-1905) dan online di www.iiste.org (E-ISSN 2222-2839).
- Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). 2019. *Stabilitas Sistem Keuangan dan Pertumbuhan Domestik Terjaga di Tengah Perlambatan Perekonomian Global*. Siaran Pers 23 April 2019. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/12386/siaran-pers-kssk-23-april-2019.pdf>
- Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). 2019. *Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga, Didukung oleh Persepsi Positif terhadap Prospek Ekonomi Indonesia*. Siaran Pers 30 Juli 2019. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Documents/Siaran-Pers-No.3-SKSSK-2019.pdf>
- Kravis, Irving B., Heston, Alan W.; dan Summers, Heston Robert. 1978. *Real GDP perkapita for More Than One Hundred Countries*. *The Economic Journal*, 88 (June 1978), pp2 15-242.
- Latip, Dedi. 2009. *Analisa Pengaruh Penanaman Modal Asing Langsung (FDI) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Propinsi Tahun 2000-2006*. Tesis. Depok: Prodi Magister FE UI.

- Latunji, Jimoh; and Weihang, He. 2017. *The Effect and Policy Analysis of Global Financial Crisis on Nigeria Economy. International Journal of Management Science and Business Administration: Volume 3, Issue 4, May 2017, pp58-64.*
- Maziarz, Mariusz. 2017. *The Reinhart-Rogoff controversy as an instance of the 'emerging contrary result' phenomenon. Journal of Economic Methodology. Volume 24, Issue 2. December 2017, pp1-13. doi:10.1080/1350178X.2017.1302598. ISSN 1350-178X*
- Mankiw, N. Gregory. 2004. *Principles of Economics*. 3rd Ed. Harvard: Thomson South-Western.
- McEachern, W.A. 2008. *Economics Principles: A Contemporary Introduction*. Virginia: South-Western Cengage Learning. p147.
- Mishkin, Frederic S. 2016. *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Columbia: Pearson.
- Musau, Salome; Muathe, Stephen; dan Mwangi, Lucy. 2018. *Financial Inclusion, GDP and Credit Risk of Commercial Banks in Kenya*. International Journal of Economics and Finance; Vol. 10, No. 3; 2018. ISSN 1916-971X E-ISSN 1916-9728.
- Mustaqim, Muhammad. 2018. *Trilogi Pembangunan Orba, Relevankah?* Artikel online tanggal 12 Oktober 2018 diakses dari portal <https://www.kompasiana.com/muhamad6530-5bc012d8c112fe48e72c3bb4/trilogi-pembangunan-orba-relevankah?page=all>
- Pathak, Ms. Eesha. 2018. *Gross Domestic Product is a Poor Measure of Growth – A Study of GDP's Inadequacies and its Alternative*. Journal of Symbiosis Centre for Management Studies, Pune Vol. 6, March 2018. P-ISSN 2348-0661.
- Safriadi; Masbar, Raja; dan Syahnur, Sofyan. 2014. *Efektifitas Antara Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian Indonesia: Pendekatan Model Is – Lm*. Jurnal Ilmu Ekonomi: Volume 2, No. 4, November 2014. ISSN 2302-0172, p85-96.
- Salim, Emil. 2010. *Pak Harto dan Trilogi Pembangunan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Schinasi, Garry J.. 2006. *Safeguarding Financial Stability: Theory and Practice*. Washington D.C: IMF Multimedia Services Division, p96
- Soehato. 1977. *Laporan Pertanggungjawaban dan Penyampaian Nota RAPBN 1997/1998*. Jakarta: DPR RI.
- Soemitro Djojohadikoesoemo. 1985. *Trilogi Pembangunan dan Ekonomi Pancasila*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Supriyanto dan Sampurna, A.F. 1999. *Utang luar negeri indonesia: argumen, relevansi dan implikasinya bagi pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Syeda, Anwar Ali Shah dan Shaikh, Faiz Muhammad. 2013. *Effects of Macroeconomic Variables on Gross Domestic Product (GDP) in Pakistan*. International Conference on Applied Economics (ICOAE) 2013. Procedia Economics and Finance 5 (2013) pp703 – 711.
- Widjojonitisastro. 2010. *Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan tulisan Widjojonitisastro*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Teliti, Dorjan; dan Kotorri, Adriatik. 2017. *The Impact of Public Debt on GDP Growth – the Debt Multiplier in the Case of Albania*. International Journal of Innovation and Economic Development: Volume 3, Issue 4, October 2017, pp60-67
- Usman, Hardius dan Nachrowi, D.N. 2006. *Pendekatan populer dan praktis ekonometrika untuk analisis ekonomi dan keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI
- Yasin, M. 2018. *Anggaran Negara Bocor Hingga 40% sejak Zaman Soemitro*. Berita detikcom tanggal 27 Juli 2018. Diambil dari portal <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-975259/kpk-anggaran-negara-bocor-hingga-40-sejak-zaman-soemitro>

Yunanto, Muhamad Yunanto dan Medyawati, Henny. 2014. *Monetary and Fiscal Policy Analysis: Which Is More Effective?* Journal of Indonesian Economy and Business: Volume 29, Number 3, 2014, pp222 – 236.

Zaghdoudi, Taha dan Hakimi, Abdelaziz. 2017. *Does external debt- poverty relationship confirm the debtoverhang hypothesis for developing counties?* Economics Bulletin, Volume 37, Issue 2, 2017.

World Bank. 2017/2018/2019. *World debt table*. Diakses dari <https://data.worldbank.org/country-/indonesia> tanggal 25 Juli 2018 jam 15.45.

World Bank. 2019. *Data GDP (current US\$) Indonesia*. Diakses dari <https://data.worldbank.org/country/indonesia?view=chart> tanggal 30 Juli 2019 pukul 11.30.